

## Mensiasati Peranan Publik Gereja dalam Masyarakat Sipil: Kajian terhadap Isu Minyak Goreng di Indonesia

Joshua Frans Kumowal<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Kristen Satya Wacana

<sup>1</sup>[752021021@student.uksw.edu](mailto:752021021@student.uksw.edu)

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mensiasati peran publik gereja terhadap isu sosial yang disebabkan oleh kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng di Indonesia. Artikel ini memanfaatkan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian, fenomena kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng tidak seharusnya terjadi dengan mempertimbangkan jumlah angka produksi yang masih jauh lebih tinggi daripada konsumsi pada saat itu. Campur tangan pihak-pihak yang berkepentingan, serta sikap pemerintah yang tidak tegas, turut melanggengkan permasalahan tersebut. Lebih lanjut, ditemukan juga bahwa akar rumput, seperti penjual angkringan, menjadi kelompok masyarakat yang paling terdampak. Pembahasan dalam artikel ini didasarkan pada langkah-langkah analisis “praxis sosial” dari J. B. Banawiratma dan J. Muller. Kesimpulannya, keberpihakan gereja kepada kelompok kecil perlu direalisasikan dengan pemanfaatan ruang publik. Gereja dapat menjadi agen masyarakat sipil untuk menyuarakan solusi dan ketidakadilan dari permasalahan yang dihadapi masyarakat.

**Kata Kunci:** Minyak Goreng, Gereja, ruang publik, masyarakat

### ABSTRACT

*This research aims to address the public role of the church in responding to social issues caused by the scarcity and rising prices of cooking oil in Indonesia. The article employs a qualitative research method with a literature review and interviews approach. The results indicate that the phenomenon of cooking oil scarcity and price hikes should not have occurred, considering that production numbers were still significantly higher than consumption at that time. The involvement of vested interests and the government's indecisive stance further perpetuated the problem. Moreover, it was found that grassroots communities, such as street food vendors, were the most affected group. The discussion in this article is based on the steps of "social praxis" analysis by J. B. Banawiratma and J. Muller. In conclusion, the church's solidarity with smaller groups needs to be realized by utilizing public spaces. The church can serve as a civil society agent to voice solutions and injustices faced by the community.*

*Keywords:* Cooking Oil, Church, public sphere, society

### Artikel History

Submit: 19 Juli 2024	Revised: 11 September 2024	Published: 14 September 2024
-------------------------	-------------------------------	---------------------------------

## PENDAHULUAN

Tulisan ini ditulis pada saat kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng sebagai bentuk kekecewaan penulis terhadap diamnya Gereja dan lembaga Kristen lainnya di Indonesia menghadapi isu tersebut (kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng terjadi pada akhir tahun 2021 hingga pertengahan tahun). Selama permasalahan berlangsung, tidak ada suara konkret dari pihak-pihak yang terafiliasi dengan agama dalam upayanya mendesak pemerintah menyelesaikan hal tersebut tanpa berlarut-larut. Dibandingkan dengan pembahasan isu politik yang sering diserukan oleh Gereja, permasalahan sosial yang terjadi akibat keterbatasan dan kenaikan harga minyak goreng sama-sama memiliki dampak signifikan dalam kehidupan masyarakat, terlebih khusus kepada kelompok akar rumput. Sebab itu, karya ilmiah ini diharapkan mampu menjadi evaluasi serta peringatan terhadap lembaga-lembaga agama yang ada, khususnya Gereja, untuk memperhatikan isu-isu sosial di masyarakat serta turut memberikan dukungan sebagai wujud nyata keberpihakannya kepada yang lemah.

Di akhir tahun 2021, terjadi kenaikan harga disusul dengan kekurangan pasokan minyak goreng di pasaran. Total produksi yang jauh melampaui besaran kebutuhan masyarakat terhadap minyak goreng menunjukkan bahwa permasalahan ini bukan disebabkan oleh faktor ketersediaan saja (<https://m.liputan6.com/bisnis/read/4908822/produksi-minyak-goreng-lampau-dmo-tapi-kok-masih-langka>, diakses pada tanggal 18 April 2022). Pengawasan pemerintah terhadap pendistribusian minyak kelapa sawit di Indonesia berperan penting pada kelangkaan itu. Sebagai salah satu komoditi pangan utama di Indonesia, keterbatasan minyak goreng sawit dapat menjadi pemicu permasalahan sosial yang lebih kompleks bagi masyarakat. Oleh karena itu, permasalahan langkanya minyak goreng di Indonesia harus menjadi perhatian bersama.

Beberapa literatur telah membahas isu minyak goreng di Indonesia. Dewi melalui tulisannya yang berjudul “Dampak Kenaikan Harga Minyak Goreng bagi Pedagang Kecil” menyatakan kenaikan minyak goreng sangat berpengaruh pada para pedagang kecil (Dewi, 2022). Lalu, Hapsa dkk dalam tulisannya “Responsibilitas Pemerintah Daerah dalam Mengatasi Ketidak Stabilan Harga Minyak Goreng di Provinsi Jambi” menegaskan Pemerintah perlu bertanggungjawab atas kenaikan secara drastis harga minyak goreng (Hapsa et al., 2022). Meskipun kedua tulisan tersebut membahas permasalahan kenaikan harga minyak goreng di masyarakat, tetapi tidak tersedianya diskursus potensi penyelesaian isu ini dengan intervensi agama menyediakan celah bagi tulisan ini. Terkait dengan relasi agama dalam penyelesaian permasalahan minyak goreng, Saadati dan Haryono telah menulis “*Panic Buying* dalam Perspektif Islam: Studi Kasus Kelangkaan Minyak Goreng di Indonesia” (Saadati & Haryono, 2023). Namun, keterbatasan pembahasannya pada *panic buying* dalam perspektif Islam menciptakan ruang eksplorasi bagi topik “Analisa Teologi Sosial terhadap Kelangkaan dan Kenaikan Harga Minyak Goreng di Indonesia.”

Secara umum, agama bermanfaat untuk mengarahkan hidup manusia secara individu maupun interaksi sosialnya dalam masyarakat (Heriyanti, 2020: 106). Pengurangan salah satu aspek dari kedua kondisi tersebut dapat mereduksi manfaat keberadaan agama. Selaras dengan

hal tersebut, Gereja hidup dan juga hadir di tengah-tengah masyarakat. Gereja diharapkan mampu membawa dampak yang baik melalui keberadaannya sehingga bermanfaat. Dalam agama Kristen, perbincangan teologis mengenai pentingnya keterlibatan umat pada permasalahan-permasalahan masyarakat, kebudayaan, ekonomi dan politik sudah diterima dengan baik (Harold, 2017: 131). Situasi ini mendorong lahirnya teologi sosial yang kritis terhadap persoalan agama dan kemanusiaan. Nilai ketuhanan dipandang perlu dibawa untuk memberi jiwa terhadap ilmu, serta memberikan manfaat yang signifikan bagi kehidupan banyak orang (Heriyanti, 2020: 106). Alasan tersebut mendorong peneliti untuk meneliti isu kelangkaan dan lonjakan harga minyak goreng dengan kajian teologi sosial model teologi publik. Analisa teologi sosial dalam tulisan ini didasarkan pada “lingkaran pastoral” yang ditawarkan oleh Banawiratma dan Muller (Banawiratma & Muller, 1995). Pada tahapan refleksi teologi, peneliti mengkolaborasikannya dengan model teologi publik yang ditawarkan Bedford-Strohm (2008), dan memanfaatkan konsep teoritis Habermas (dikutip dari, Gunawan & Bangun, 2020) tentang *public sphere* dalam tahapan aksi. Melalui ini, umat Gereja diharapkan mampu memahami dan merealisasikan iman Kristen di dalam kehidupan bermasyarakat.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi literatur dan wawancara. Pada penelitian kualitatif, peneliti memasuki situasi sosial tertentu, yang dapat berupa lembaga pendidikan tertentu, melakukan observasi dan wawancara kepada orang-orang yang dipandang tahu tentang situasi sosial tertentu (Hengki Wijaya, 2018). Peneliti mengambil data-data melalui tulisan-tulisan yang memuat informasi kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng di Indonesia. Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara kepada seorang penjual angkringan dengan tujuan melihat dampak yang dihasilkan dari kenaikan harga minyak goreng disertai kelangkaannya pada akar rumput. Validitas data dilakukan dengan memanfaatkan teknik triangulasi sumber.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Fenomena Kelangkaan Minyak Goreng

Minyak goreng merupakan salah satu dari sembilan bahan pokok (Sembako) sesuai dengan putusan yang ditentukan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia mengenai kebutuhan pokok masyarakat. Minyak merupakan zat cair yang berasal dari lemak tumbuhan maupun hewan yang telah dimurnikan. Minyak goreng memiliki beberapa jenis, sesuai dengan bahan yang digunakan untuk membuatnya, yaitu kelapa sawit, kelapa, jagung, kedelai, kacang tanah, kanola dan bunga matahari. Tipe dari kelapa sawit merupakan minyak goreng favorit masyarakat Indonesia.

Minyak goreng merupakan barang yang susah dicari pada akhir tahun 2021 sampai awal tahun 2022 di Indonesia atau tepatnya di toko-toko. Walaupun pemerintah Indonesia telah memberikan subsidi kepada masyarakat menjadi berupa Rp.14.000 per liter, tetapi hal itu justru

membuat kelangkaan bagi masyarakat di kota besar (Siska Yuli Anita, 2022). Hal tersebut dapat dilihat melalui data konsumsi minyak goreng pada tahun 2002 sebesar 2,65 (78,7%) dengan jumlah keseluruhan sebesar 3,4 juta ton. Selanjutnya, ada minyak goreng dari kelapa sejumlah 0,66 juta ton (19,7%) dan yang lainnya (kedelai hingga bunga matahari) sejumlah 0,073 (1,7%) (Kemendag, 2016). Keberadaan Indonesia sebagai negara produsen sawit membuat minyak ini cukup ideal dari mengenai harga dan ketersediaannya.

Adapun kandungan gizi di dalamnya juga menjadi keunggulan yang membuat minyak goreng sawit lebih sering digunakan dibandingkan jenis yang lain. Setiap sendok makan terdapat 114 kalori dengan detail 5 gram asam lemak tak jenuh tunggal, 7 gram asam lemak jenuh, dan 1,50 gram asam lemak tak jenuh ganda pada minyak kelapa sawit. Terdapat juga kandungan Vitamin E sebesar 11% dari asupan harian yang disarankan. Minyak tersebut mengandung pigmen kemerahan yang disebut senyawa karotenoid, yang merupakan antioksidan yang nanti bisa diubah sebagai vitamin A di dalam tubuh (Rahayu, 2022: 27). Faktor pemenuhan gizi dan ketersediaan terhadap kebutuhan masyarakat membuat minyak goreng sawit lebih sering digunakan. Dengan demikian, keberadaan minyak goreng begitu penting bagi masyarakat.

Terjadi lonjakan harga minyak goreng pada November tahun 2021 sebesar Rp. 24.000 per liter. Kenaikan harga tersebut mendorong pemerintah menerapkan perubahan kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) pada komoditi tersebut. Berdasarkan kebijakan yang ditetapkan, detail harga minyak goreng yang ditentukan pemerintah sejak 1 Februari 2022: minyak goreng curah bernilai Rp. 11.500/liter, minyak goreng kemasan sederhana bernilai Rp. 13.500/liter, serta minyak goreng kemasan premium bernilai Rp. 14.000/liter. Pengurangan harga diharapkan bisa menjadi jalan keluar terhadap permasalahan kenaikan harga minyak goreng. Namun, turunnya harga minyak goreng membuat keberadaannya langka karena langsung dibeli masyarakat (<https://money.kompas.com/read/2022/03/16/160215526/berapa-harga-minyak-goreng-terbaru-yang-diatur-pemerintah?page=all>, diakses pada tanggal 18 April 2022).

Fenomena kelangkaan minyak goreng yang terjadi di Indonesia merupakan hal yang janggal mengingat status Indonesia sebagai produsen minyak kelapa sawit terbesar di duni. Sesuai dengan informasi Kementerian Perindustrian (Kemenperin), pada tahun 2021, produksi minyak goreng yang dihasilkan mencapai 20,22 juta ton (<https://m.liputan6.com/bisnis/read/4908822/produksi-minyak-goreng-lampau-dmo-tapi-kok-masih-langka>, diakses pada tanggal 18 April 2022). Dengan total produksi sebanyak itu, kebutuhan dalam negeri terhadap minyak goreng dapat dipenuhi. Kebutuhan dalam negeri hanya sebesar 25,07% (5,07 juta ton), dengan 74,93% (15,55 juta ton) sisanya untuk diekspor. Jumlah kebutuhan masyarakat terhadap minyak goreng masih jauh di bawah total produksi. Kurangnya pengawasan pemerintah pada salah satu bahan pokok ini menjadi salah satu faktor kelangkaan dapat terjadi.

Menurut *Institut for Demographic and Poverty Study* (IDEAS), dampak ekonomi dari kenaikan harga minyak goreng mencapai total kerugian sebesar Rp. 3,38 triliun, dari akumulasi dua periode yaitu April sampai September 2021 serta Oktober 2021 sampai 19 Januari 2022 (<https://dataindonesia.id/bursa-keuangan/detail/riset-ideas-kerugian-krisis-minyak-goreng-capai-rp338-triliun>, diakses pada 18 April 2022). Berdasarkan klasifikasi ekonomi, masyarakat

yang memiliki pengeluaran per kapita Rp. 1 juta hingga Rp. 1,5 juta per bulan menanggung dampak kerugian terbesar, yakni Rp. 0,82 triliun. Selanjutnya, disusul oleh kelompok masyarakat berdasarkan pengeluaran per kapita Rp. 600 ribu hingga 800 ribu per bulan yang menyandang kerugian Rp. 0,54 triliun. Masyarakat dengan pengeluaran di bawah Rp. 300 ribu berada urutan terbawah dengan kerugian sebesar Rp. 0,07 triliun. Dari data tersebut, dapat dilihat bahwa dampak dari permasalahan pendistribusian minyak goreng dirasakan oleh semua kalangan dengan kelas ekonomi yang beragam, dalam hal ini bahkan kelompok masyarakat dengan pengeluaran paling kecil.

### **Mensiasati Peranan Publik Gereja dalam Masyarakat Sipil Terhadap Fenomena Minyak Goreng**

Pada bagian ini, peneliti berusaha untuk memahami situasi sosial secara menyeluruh dengan mencari hubungan historis dan strukturalnya (Holland & SJ, 1986: 30). Dalam penggunaannya, analisis sosial berperan untuk menangkap dan memahami realitas yang dihadapi. Peneliti melakukan penyelidikan yang mendalam terhadap sejumlah unsur yang ada di masyarakat, seperti dimensi historis, unsur-unsur struktural, serta pelbagai derajat dan tingkatan masalah.

Fenomena kelangkaan minyak goreng adalah hal yang semestinya tidak terjadi di Indonesia, dengan mempertimbangkan perbandingan produksi yang begitu melimpah jika dibandingkan dengan jumlah kebutuhan masyarakat. Dengan alasan tersebut, pengawasan dan kebijakan pemerintah terkait pendistribusian minyak goreng sawit di pasara dapat dilihat sebagai salah satu penyebab kenaikan harga yang disusul dengan kelangkaan dari salah satu Sembako tersebut. Kebijakan seperti penetapan HET minyak di dalam negeri sebesar Rp. 14.000 per liter dianggap membuat para produsen memilih untuk mengeksport hasil kebunnya ke luar negeri lantaran lonjakan harga minyak nabati dunia sejak tahun lalu. Kebijakan tanpa disertai dengan pengawasan yang ketat sebaiknya dilakukan oleh pemerintah agar dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Persoalan pengawasan distribusi terhadap bahan pokok sepatutnya menjadi perhatian pemerintah sehingga fenomena kenaikan harga dan kelangkaan bahan pangan di dalam negeri dapat diantisipasi, mengingat fenomena seperti ini sering terjadi.

Kenaikan dan kelangkaan bahan-bahan kebutuhan pokok di Indonesia merupakan keadaan yang terus-menerus terjadi setiap tahunnya. Naiknya jumlah permintaan yang tidak disertai ketidaksiapan pasokan menjadi pemicu hal tersebut dapat terjadi. Mengkritisi hal tersebut, Engkus berpendapat bahwa diperlukan peningkatan efektivitas pelaksanaan penegakan hukum dan kebijakan oleh pemerintah sebagai respon terhadap permasalahan yang dialami masyarakat (Engkus, 2018). Peristiwa kenaikan dan kelangkaan bahan kebutuhan pokok merupakan sebuah bentuk pembiaran pemerintah terhadap masyarakatnya yang menderita pada permasalahan yang sama tiap tahunnya. Peristiwa-peristiwa demikian sepatutnya menjadi sebuah peringatan bagi pemerintah untuk berbenah dan dapat menghindari hal-hal tersebut.

Keterbatasan pasokan minyak goreng yang terjadi di Indonesia membawa dampak terhadap beberapa aspek kehidupan masyarakat. Kenaikan salah satu bahan pokok pangan

dapat membawa perubahan seperti kenaikan harga pada bahan-bahan lainnya yang dalam proses pembuatannya menggunakan minyak goreng. Dalam hal ini, penjual angkringan menjadi salah satu kelompok masyarakat yang terdampak oleh fenomena kelangkaan tersebut.

Angkringan adalah sebuah tempat makan sederhana yang biasanya dijumpai di pinggir jalan. Angkringan identik dengan gerobak yang di sampingnya tersedia tempat duduk bagi pelanggan. Makanan dan minuman yang terjangkau menjadi faktor menarik bagi konsumen dalam memilih angkringan dibandingkan tempat-tempat makan yang lain. Makanan yang tersedia di angkringan meliputi nasi kucing (porsi kecil nasi dengan lauk berupa teri, tempe, atau bandeng), gorengan, dan berbagai olahan bacem. Sedangkan, minuman yang tersedia adalah teh, jahe, dan berbagai jenis minuman saset, dengan pilihan panas atau dingin (ditambahkan es). Angkringan populer di Kota Solo dan Yogyakarta, tetapi dapat ditemukan juga di beberapa tempat sekitar kedua kota tersebut.

Keberadaan angkringan sangat bermanfaat sangat bermanfaat bagi masyarakat lainnya, terutama bagi kelompok dengan kelas ekonomi di bawah, dikarenakan harga makanan yang begitu murah. Namun, kelangkaan yang juga disertai dengan kenaikan harga minyak goreng dapat membawa dampak kerusakan pada aspek ekonomi masyarakat kelas bawah. Kelangkaan dan kenaikan harga pangan akan memaksa penjual tersebut untuk menaikkan harga makanan yang dijualnya sehingga konsumen yang banyak diisi oleh masyarakat dengan kelas ekonomi yang rendah yang disulitkan. Penjual angkringan juga mengalami kondisi yang lebih kompleks, dengan menaikkan harga makanan akan membuat pelanggan berkurang atau memilih tempat makan yang lain. Di sisi lain, dengan mempertahankan harga makanan yang menggunakan bahan pangan yang langka dan mengalami kenaikan harga, keuntungan kecil yang diperoleh penjual angkringan akan semakin terpotong dan bahkan dapat membawa kebangkrutan jika terus dipertahankan.

Lebih kritis lagi, Pratama (2014) berpendapat bahwa pendapatan yang begitu rendah dapat mengurangi kesempatan dalam mendapatkan pendidikan yang baik dan dalam jenjang yang lebih tinggi, disebabkan tingginya biaya pendidikan di Indonesia jika dibandingkan dengan rata-rata pendapatan masyarakat. Rendahnya pendidikan yang ditempuh mengakibatkan ketidakmampuan masyarakat mengembangkan keterampilan dan kompensasi yang memadai, sehingga berdampak pada produktivitas rendah dan pendapatan yang minim bagi mereka. Situasi ini akan mengakibatkan terbentuknya sebuah lingkaran kemiskinan. Oleh karena itu, isu kelangkaan bahan pangan harus menjadi perhatian khusus pemerintah. Dampak yang besar bagi masyarakat, dapat menjadi sebuah dorongan terhadap keseriusan pemerintah dalam pengambilan keputusan terkait kasus kelangkaan ini dan langkah-langkah antisipasi yang diambil agar kelangkaan bahan pokok masyarakat tidak terulang kembali.

Indonesia bukanlah satu-satunya pihak yang terkena dampak dari kelangkaan minyak sawit. Penggunaan minyak sawit sebagai bahan baku beragam produk – seperti minyak goreng, produk makanan, campuran biodiesel, kosmetik, dan lapisan baja – membuat semakin banyak pihak yang terdampak. Ada beberapa faktor yang memicu kelangkaan minyak sawit, antara lain: Pertama, produksi minyak nabati mengalami penurunan di Amerika Latin dan Eropa. Kedua, di Malaysia, terjadi penurunan produksi sawit. Ketiga, hadirnya konflik antara Rusia-Ukraina (Ukraina adalah produsen minyak nabati terbesar pada Kawasan Eropa, lihat

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220317183716-92-772794/melihat-tren-lonjakan-harga-cpo-biang-kerok-minyak-goreng-selangit>, diakses pada tanggal 18 April 2022). Dari pada itu, dapat dilihat bahwa permasalahan kelangkaan minyak nabati jenis sawit merupakan masalah yang terjadi dalam tingkat lokal, regional, nasional dan internasional.

Melalui pembahasan tersebut, terjadinya kelangkaan yang disertai dengan kenaikan harga minyak goreng di Indonesia menghadirkan berbagai macam pandangan dari setiap orang. Beberapa orang beranggapan kelangkaan minyak goreng sebagai fenomena yang wajar terjadi, melihat keberadaan minyak sawit dunia sedang mengalami kelangkaan yang diakibatkan dari beberapa faktor yang sudah dijelaskan. Sementara itu, pihak lain beranggapan bahwa kelangkaan dapat diatasi dengan pengambilan kebijakan yang tepat disertai pengawasan ketat oleh pemerintah terhadap pendistribusiannya, mengingat jumlah produksi Indonesia terhadap minyak sawit yang begitu melimpah jika dibandingkan dengan angka jumlah kebutuhan masyarakat.

Gereja perlu menyadari keberadaannya dan tanggungjawab di tengah-tengah masyarakat seperti apa. Dengan menyadari peran tanggungjawab itu maka perlu aksi sosial terhadap semua masyarakat didekat mereka. Gereja perlu memastikan bahwa peran mereka selalu menjadi proaktif akan permasalahan yang terjadi sehingga tidak turut diam saja melainkan ada aksi nyata yang membantu masyarakat untuk menemukan kembali hak mereka. Artinya, dalam pergumulan masyarakat, gereja turut ambil andil untuk menjadi teman sejati bagi jemaat dan masyarakat sekitar (Erni Rehulina Surbakti & Joyanda Sianturi, 2022).

### **Refleksi Teologis Terhadap Isu Kelangkaan Minyak Goreng di Indonesia**

Persoalan kelangkaan yang disertai dengan kenaikan harga minyak goreng di Indonesia menghadirkan permasalahan sosial bagi masyarakat luas. Fenomena tersebut sepatutnya tidak terjadi di Indonesia yang memproduksi minyak sawit dalam jumlah yang besar. Sesuai dengan data yang sudah dijabarkan, kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap minyak sawit masih jauh di bawah jumlah produksi. Peran pemerintah dalam mengantisipasi dan merespon situasi ini dinilai menjadi salah satu faktor mengapa kelangkaan minyak goreng dapat terjadi. Oleh karena itu, diperlukan diskursus dari pihak masyarakat yang terdampak agar dapat mendorong pemerintah untuk sesegera mungkin menyelesaikan permasalahan kelangkaan bahan pokok pangan ini dan juga untuk mengambil langkah-langkah antisipatif demi menghindari peristiwa serupa.

Gereja dapat menjadi sarana penghubung masyarakat kecil yang terdampak dengan pemerintah yang memiliki kuasa menyelesaikan isu-isu yang ada. Kekristenan memiliki perangkat filosofis etis yang mendukung realisasi situasi tersebut. Hubungan yang benar dengan Tuhan tidak mungkin terpikirkan tanpa dorongan untuk mencapai hubungan yang benar dengan sesama manusia. Iman yang dimiliki orang Kristen tidak hanya berbicara mengenai hubungannya dengan Tuhan, tetapi juga relasi yang baik dengan sesamanya. Dalam hal ini, hubungan yang benar dengan sesama manusia bukanlah pengorbanan yang harus dilakukan demi memenuhi perintah-perintah Allah, tetapi sumber daya untuk kehidupan yang baik (Bedford-Strohm, 2008). Dengan berlandaskan Yesaya 58:10, Bedford-Strohm memperjelas penekanannya terhadap perhatian kepada mereka yang lapar dan pihak-pihak yang tertindas.

Karena itu, diperlukan kepedulian Gereja dalam memprioritaskan kepentingan kelompok kecil yang tidak berdaya.

Dalam konsep teologi publik yang ditawarkan Bedford-Strohm (2008), Gereja dipandang dapat memiliki peran publik sebagai agen dalam masyarakat sipil. Gagasan ini tidak mengikat pilihan bagi kaum miskin pada pilihan politik tertentu, tetapi melihat di dalamnya dasar bagi wacana politik yang mengarah pada strategi politik yang juga berlaku bagi mereka yang berkuasa. Gereja secara eksplisit memasukkan dimensi nilai dalam kontribusinya pada debat publik. Sarana untuk kontribusi ini berkisar dari pernyataan publik, hingga demonstrasi dan bahkan tindakan pembangkangan sipil yang terbatas ketika hal tersebut menjadi satu-satunya cara untuk memperlihatkan ketidakadilan yang parah. Pernyataan publik model teologi publik, di satu sisi menjelaskan akar alkitabiah dan teologisnya, pada sisi lain menjelaskan pernyataannya menggunakan bahasa wacana sekuler.

Perhatian Gereja pada kelompok masyarakat yang tertindas sebagai dampak permasalahan kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng sangat dibutuhkan. Gereja diharapkan mampu menjadi agen pembawa suara mereka yang tertindas, sehingga mendorong pemerintah menyelesaikan permasalahan ini dan mengambil langkah-langkah preventif sehingga permasalahan yang sama tidak derita lagi oleh masyarakat. Gereja merupakan sebuah lembaga keagamaan yang terdiri dari banyak lapisan masyarakat. Keberadaan Gereja yang memiliki berbagai macam sumber daya manusia (SDM) membuatnya sangat potensial memberikan dampak dalam diskursus di ruang publik, yang tidak bisa dicapai jika dilakukan langsung oleh masyarakat kecil.

Berbagai isu yang terjadi di Indonesia termasuk kelangkaan minyak goreng memberikan posisi bagi gereja untuk mengutarakan suara teologis mereka mengenai “kebebasan gereja” yang mencerminkan kedudukan pendapat yang lebih luas dalam masyarakat sipil. Oleh karena itu, gereja ketika mengizinkan hak kebebasan dalam memberikan suara atau pendapat maka gereja dengan sendirinya akan berkembang untuk memajukan kerangka berpikir yang lebih luas. Namun, dengan keberadaan gereja sekarang jika dipahami sebagai bagian dari masyarakat sipil, maka para teolog Kristen akan memberikan pandangan bahwa gereja sebagai suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari asosiasi bebas masyarakat sipil lainnya (Novak, 1991). Kewenangannya berasal dari Tuhan dan bukan dari negara. Gereja termasuk dalam masyarakat sipil, tetapi belum sepenuhnya dan dengan berpandangan sekuler yang lebih luas bagi masyarakat sipil, bukan jika gereja dipandang sebagai kelompok yang tepad berada dalam masyarakat sipil sehingga demikian bebas dari pemerintahan atau diperintahkan langsung dari negara (Rynaldi Mahardika Situmeang, 2024).

### **Aksi Sosial Gereja Terhadap Kelangkaan Minyak Goreng di Indonesia**

Kelangkaan minyak goreng di Indonesia membawa dampak besar bagi masyarakat. Dengan demikian, Gereja perlu memanfaatkan ruang publik untuk membangun diskursus yang sarat pada keberpihakan masyarakat kecil. Penyelesaian masalah yang tidak tegas dan bersifat temporer dari pemerintah sepatutnya perlu dikritik. Habermas (dikutip dari Gunawan & Bangun, 2020) berpendapat bahwa diskursus merupakan sebuah proses diskusi dengan tujuan memperoleh kesepakatan melalui argumen-argumen partisipan yang berkomunikasi.

Diskursus dapat dilaksanakan dalam ruang publik sehingga dapat diakses oleh semua orang. Sebelum terlibat dalam peninjauan yang berpotensi memengaruhi kebijakan publik, Gereja perlu mempertimbangkan logika epistemik sehingga tidak bergantung pada sumber keagamaan yang sangat subyektif (Habermas, 2005). Hal ini bertujuan untuk menciptakan diskursus di ruang publik yang tidak hanya mengidentifikasi permasalahan yang ada, tetapi mentematisasi persoalan, menawarkan solusi dan mengusahakan agar opini masyarakat dalam ruang publik didengar oleh pemerintah. Kompleksitas proses-proses diskursus dalam ruang publik bisa menjadi hambatan bagi masyarakat kecil menyuarakan ketidakadilan yang sedang dideritanya. Karena itu, peran Gereja menjadi sangat dibutuhkan sebagai pembuka ruang diskursus masyarakat dan pemerintah. Gereja juga dapat menjadi penerjemah suara keresahan akar rumput pada pemerintah, mengenai pengurusan permasalahan kenaikan harga dan kelangkaan minyak goreng di pasaran yang sangat berlarut-larut, yang diabaikan karena keterbatasan bahasa akademik.

Kesadaran kolektif juga sangat dibutuhkan dalam memandang persoalan ini. Gereja dapat menjadi pelopor mensiasati gerakan bersama dalam menyuarakan ketidakadilan yang terjadi di masyarakat (Yewangoe, 2005). Gereja bisa memanfaatkan peran ruang publik virtual untuk menciptakan sebuah gerakan sosial yang masif dan tersistematis dengan baik. Keberadaan dunia virtual sebagai ruang publik memberikan potensi untuk memengaruhi masyarakat secara lebih luas karena tidak dibatasi dengan batas-batas yang ada dalam ruang-ruang fisik (Haezer, 2018). Upaya Gereja yang awalnya hanya berupa menyadarkan jemaat terhadap situasi menyedihkan yang dialami oleh masyarakat kecil, dapat dikembangkan secara lebih luas lagi seperti membangkitkan kesadaran masyarakat secara kolektif terhadap isu sosial yang ada. Hal ini bertujuan menghadirkan pemikiran kritis yang mampu menciptakan keberpihakan pada kelompok kecil yang terdampak pada permasalahan kenaikan harga dan kelangkaan minyak goreng dalam sebuah lingkungan masyarakat yang ditinggalinya.

## KESIMPULAN

Kelangkaan minyak goreng di Indonesia telah membawa dampak besar bagi masyarakat, terutama kelompok kecil yang paling terdampak. Dalam situasi ini, Gereja memiliki peran penting dalam memanfaatkan ruang publik untuk membangun diskursus yang berpihak pada masyarakat kecil. Gereja dapat berperan sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah, mengartikulasikan suara keresahan masyarakat kecil yang sering terabaikan karena keterbatasan akses dan bahasa. Dengan memanfaatkan ruang publik virtual, Gereja juga dapat menjadi pelopor gerakan sosial yang lebih luas dan terstruktur dalam menggalang kesadaran kolektif untuk menyuarakan ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat. Langkah ini bertujuan tidak hanya untuk mengidentifikasi permasalahan, tetapi juga menawarkan solusi dan memastikan suara masyarakat kecil didengar oleh pemerintah.

## REFERENSI

- Banawiratma, J. B., & Muller, J. (1995). *Berteologi Sosial Lintas Ilmu* (3rd ed.). Kanisius.
- Bedford-Strohm, H. (2008). *Poverty and Public Theology: Advocacy of the Church in*

- Pluralistic Society. *International Journal of Public Theology*, 2(2), 144–162.  
<https://doi.org/10.1163/156973208x290017>
- Dewi, L. R. (2022). Dampak kenaikan harga minyak goreng bagi pedagang kecil. *Journal of Economics and Social Sciences (JESS)*, 1(2), 67–75.
- Engkus, E. (2018). Implementasi Undang-Undang Perdagangan Dan Implikasinya Dalam Pengendalian Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat. *Litigasi*, 18(1), 1–40.  
<https://doi.org/10.23969/litigasi.v18i1.284>
- Erni Rehulina Surbakti & Joyanda Sianturi. (2022). Peduli Lingkungan sebagai Bagian Pelayanan Sosial Gereja. *Jurnal Semper Reformanda*, 4(1), 37–44.
- Gunawan, L. A. S., & Bangun, N. C. M. (2020). Diskursus Agama Dalam Ruang Publik Menurut Jäcergen Habermas. *Logos*, 16(2), 1–25.  
<https://doi.org/10.54367/logos.v16i2.1028>
- Habermas, J. (2005). Religion in the Public Sphere. *Holberg Prize Seminar*.  
<https://doi.org/10.5840/philafricana2005823>
- Haezer, E. (2018). Menyoal Internet Sebagai Ruang Publik Dalam Perspektif Habermas. *Dakwatuna: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi Islam*, 4(2), 181.  
<https://doi.org/10.36835/dakwatuna.v4i2.301>
- Hapsa, Baldawi, A., & Salmia. (2022). Responsibilitas Pemerintah Daerah dalam Mengatasi Ketidak Stablan Harga Minyak Goreng di Provinsi Jambi. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 6(1), 1160–1168.
- Harold, R. (2017). Peran “ Teologi Sosial ” Gereja Protestan Di Gorontalo ( GPIG ) Dalam Menanggapi Masalah Kemiskinan. *Jurnal Jaffra*, 15(1).
- Hengki Wijaya. (2018). *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi*. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.
- Heriyanti, K. (2020). Implikasi Teologi Sosial dalam Kehidupan Bermasyarakat. *Sphatika: Jurnal Teologi*, 11(2), 105–115.
- Holland, J., & SJ, P. H. (1986). *Analisis Sosial dan Refleksi Teologis: Kaitan Iman dan Keadilan*. Kanisius.
- Kemendag. (2016). Profil Komoditas Minyak Goreng. *Jakarta*, 84.
- Novak, M. (1991). *The Spirit of Democratic Capitalism*. Madison Books.
- Pratama, Y. C. (2014). Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 4(2). <https://doi.org/10.36917/japabis.v1i2.18>
- Rahayu, R. N. (2022). Kenaikan Harga Minyak Goreng Kelapa Sawit di Indonesia Sebuah Analisis Berita Kompas On Line. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 3(8), 26–37.
- Rynaldi Mahardika Situmeang. (2024). HEGEMONI AGAMA DI INDONESIA: PERSPEKTIF PASTORAL LINTAS AGAMA. *Diegesis Jurnal Teologi*, 9(2), 231–243.
- Saadati, N., & Haryono, S. (2023). Panic Buying dalam Perspektif Islam: Studi Kasus Kelangkaan Minyak Goreng di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 7(2), 937. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v7i2.1168>
- Siska Yuli Anita. (2022). PENGARUH PANIC BUYING TERHADAP MINAT BELI

KONSUMEN SECARA IMPULSE BUYING PADA PRODUK MINYAK GORENG.  
*Derivatif Jurnal Manajemen*, 16(1), 72–84.

Yewangoe, A. A. (2005). Agama-agama dan Perjuangan Hak-hak Sipil. In *Agama-agama dan Perjuangan Hak-hak Sipil*. Bidang Marturia - PGI.